

**IKU TAHUN 2021-2026**

**PENETAPAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA  
(IKU)**



**DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026 berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 bertujuan untuk menjadi pedoman/acuan bagi Sekretariat, Bidang dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Tahun 2021-2026 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan semoga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Padang, Desember 2021  
KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

**YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19690406 199701 1 002

## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Penetapan Kinerja dan IKU.....	3
BAB II RENCANA STRATEGIS/ RPJM .....	4
2.1 Pernyataan Visi Kepala Daerah .....	4
2.2 Pernyataan Misi dan Tujuan .....	4
2.3 Sasararan Strategis.....	5
2.4 Kebijakan dan Strategis pencapaian sasaran.....	5
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026.....	7
3.1 Indikator Kinerja Utama .....	7
3.2 Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan keluaran sub kegiatan .....	10
BAB IV PENUTUP.....	18
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	19

# ***BAB I***

## ***PENDAHULUAN***

### **A. Latar Belakang**

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia yang wajib disyukuri. Hutan merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya yang wajib di jaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia Internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan Nasional.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa terkandung jiwa dan semangat kerakyatan, keadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan serta bertanggung gugat.

Hutan di Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang perubahan kedua Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 19 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) Ha, sehingga kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat **seluas ± 2.342.893 Ha**. Sebagian besar Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Sumatera Barat berada pada jajaran Bukit Barisan dengan topografi bergelombang dan merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*), hulu-hulu sungai-sungai yang mengalir ke Provinsi Riau dan Jambi. Kondisi tersebut memiliki kaitan erat dengan ekosistem kawasan hutan yang sebagian besar berfungsi sebagai Hutan Lindung dan Hutan Konservasi.

Kondisi kawasan hutan Sumatera Barat sampai dengan saat sekarang terus mengalami tekanan sebagai akibat adanya proses perkembangan pembangunan terutama kebutuhan wilayah untuk kegiatan non kehutanan. Tekanan terhadap lahan hutan baik untuk kebutuhan masyarakat maupun untuk pembangunan non-kehutanan dirasakan terus meningkat sehingga lahan kritis saat ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Nomor : SK.4/V-DAS/2015 Tentang Penetapan Peta Dan Data Hutan Dan Lahan Kritis Nasional Tahun 2013 seluas ± 485.907 Ha kritis dan 144.788 Ha Sangat Kritis. Disisi lain tekanan terhadap lahan hutan adanya perambahan hutan/peladang berpindah dan kebakaran hutan perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pembangunan kehutanan Sumatera Barat merupakan bagian dari pembangunan kehutanan nasional, yang akan diwujudkan melalui visi dan misi pembangunan kehutanan Sumatera Barat. Namun perlu disadari bersama bahwa pada hakekatnya pengelolaan hutan harus

didasari atas prinsip pengelolaan yang bertanggung jawab/*accountable*, menjaga daya dukungnya secara lestari (*sustainable*) harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat adat dan budaya serta tata nilai masyarakat Sumatera Barat dengan memperhatikan norma hukum nasional.

Mengacu kepada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, pengelolaan sumber daya hutan lebih mempertimbangkan keseimbangan antara aspek budaya, ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat.

Untuk itu telah dirumuskan bersama komitmen institusi kehutanan Provinsi Sumatera Barat dituangkan dalam bentuk perencanaan yang akan dijadikan acuan sementara yaitu Draft Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026.

Berkenaan dengan Pelaksanaan RENSTRA dalam tahun berjalan maka dijabarkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam Hal mengukur hasil pencapaian dari pelaksanaan program dan kegiatan maka di pandang perlu untuk di tetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) yang merupakan keluaran Program Pembangunan Kehutanan.

## **B. Ruang Lingkup Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Ruang lingkup Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 mencakup Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerjanya yang menjadi satu kesatuan sebagai akibat peningkatan tataran pengukuran kinerja dari keluaran (output) kegiatan menjadi keluaran program (outcome) pada Tahun 2021-2026.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS/RPJM**

#### **A. Pernyataan Visi**

Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) untuk Rancangan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2020-2024, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ikut mendukung Visi Pemerintah Daerah Sumatera Barat yaitu :

**“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN.”**

#### **B. Pernyataan Misi dan Tujuan**

Dalam mewujudkan visi di atas, Pemerintah Daerah Sumatera Barat membagi kedalam beberapa misi, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ikut mendukung capaian 2 capaian misi Pemerintah Daerah Sumatera Barat yaitu:

- 1) Misi 3 : Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
- 2) Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan misi 3 (tiga) dan misi 6 (enam) Pemerintah Daerah Sumatera Barat tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Menetapkan 2 (dua) Tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Pendapatan Petani Hutan dengan indikator tujuannya adalah Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan.
2. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dengan indikator tujuannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

### C. Sasaran Strategis

Dalam upaya mewujudkan tujuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tersebut maka ditetapkan sasaran strategis yang akan dicapai berupa :

1. Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yang dikelola Kelompok Masyarakat;
2. Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan;
3. Meningkatkan kualitas hutan dan lahan.

### D. Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran

Kebijakan dan Strategi ditempuh untuk pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3: Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.		
1. Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yang dikelola Kelompok Masyarakat	1. Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema HTR,HN, HKm, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan</li> <li>2. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</li> <li>3. Peningkatan kapasitas SDM petani hutan</li> </ol>
2. Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan	2. Pengembangan usaha pemanfaatan hutan, jasa lingkungan dan ekowisata 3. Fasilitasi pembangunan industri hilir dan hasil kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</li> <li>2. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</li> <li>3. Pengembangan tanaman unggulan lokal dan produktif</li> <li>4. Memfasilitasi pembangunan pasca panen produk kehutanan non kayu</li> </ol>
	4. Peningkatan Kinerja perusahaan dan penatausahaan hasil hutan serta industry kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mekanisme perhutanan social</li> <li>2. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</li> <li>3. Perbenihan Tanaman Hutan</li> <li>4. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m<sup>3</sup>/Tahun</li> <li>5. Penegakan hukum dalam pengamanan dan perlindungan hutan</li> <li>6. Peningkatan pengelolaan kawasan hutan pada tingkat tapak /pengembangan KPH</li> </ol>



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan		
3. Meningkatkan kualitas hutan dan lahan	1. Percepatan Proses Pemantapan Kawasan Hutan	1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 2. Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
	2. Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim	1. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 2. Pengembangan kelembagaan masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim dan pembangunan rendah karbon
	3. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya hutan	1. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 2. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting 3. Pelaksanaan Pengelolaan DAS terpadu

### **BAB III**

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026**

#### **A. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, untuk sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Dinas Kehutanan yang akan dicapai pada Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table berikut ini.

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Sumber Data</b>
1.	Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yang dikelola Kelompok Masyarakat	Intern: data merupakan persentase luas kawasan hutan yang diusulkan hingga tahap verifikasi untuk dapat dikelola oleh masyarakat/kemitraan pada tahun N terhadap jumlah luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi dikali angka 100%. Data diperoleh dari laporan tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang telah ditunjuk untuk melakukan proses pengusulan hingga verifikasi kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat/kemitraan.
2.	Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan	Intern: data diperoleh berdasarkan laporan hasil survey dan monitoring terhadap kelompok-kelompok tani hutan yang berada pada wilayah Sumatera Barat dan berada dalam naungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Laporan hasil survey dan monitoring pada tahun N kemudian dibandingkan dengan Laporan hasil survey dan monitoring tahun sebelumnya.
3.	Meningkatkan kualitas hutan dan lahan	Intern: data diperoleh adalah data hasil survey dan monitoring oleh tim Dinas Kehutanan terhadap tutupan lahan kemudian melakukan olah data menggunakan aplikasi Arc.GIS, kemudian melakukan perhitungan overlay terhadap tutupan lahan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut diatas akan menjadi tolok ukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021-2026. Jika dikaitkan dengan Sasaran Strategis dan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021-2026, maka dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel berikut.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	KEGIATAN	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Kelompok Masyarakat	a. Luas Kawasan Hutan yang Dikelola	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
					Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
					Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
2	Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan	a. Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Program Pengelolaan Hutan	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung
					Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi
					Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH
					Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan

						Sub Kegiatan penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
						Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih
						Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih
						Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit
						Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
3	Meningkatnya Kualitas Hutan dan Lahan	Indeks Tutupan Hutan	Program Pengelolaan Hutan	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
					Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
					Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
					Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	
				Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
				Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	

				Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu
					Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
				Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
					Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
					Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
					Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS

## B. Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Keluaran Sub Kegiatan

Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama yang merupakan keluaran program yang bersumber pada gabungan hasil-hasil dari kegiatan, sedangkan capaian indikator kegiatan merupakan gabungan hasil-hasil dari pelaksanaan sub kegiatan, sehingga pada tataran implementasi Indikator Kinerja Utama akan dicapai dengan gabungan hasil sub kegiatan, lebih rinci indikator program dan sub kegiatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

## 1. Indikator Sasaran Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan

Indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Hutan, dengan 2 (dua) kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dan Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan. Adapun sub kegiatan yang berada pada program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
I Program Pengelolaan Hutan	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan
A Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terlaksananya pemanfaatan hutan pada wilayah KPH
1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Informasi Wilayah Usaha Pada Kawasan Hutan Produksi yang tersedia
2 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Informasi Wilayah Usaha Pada Kawasan Hutan Lindung yang tersedia
3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah wilayah Produksi Hasil Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi (termasuk PNBK)
	Jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang Termonitor pada kawasan hutan produksi
4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah wilayah Produksi Hasil Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung (termasuk PNBK)
	Jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang Termonitor pada kawasan hutan lindung
5 Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit KPHP yang dinilai
6 Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah unit KPHL yang dinilai

7	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan pemanfaatan hutan
8	Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah komoditi/produk yang dikembangkan pada wilayah KPH
		Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH
B	Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	Sertifikasi mutu benih/bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan
9	Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Pengada dan Pengedar benih dan/atau bibit
10	Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah sertifikasi sumber benih
11	Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah sertifikasi mutu benih
12	Sub Kegiatan Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah sertifikasi mutu bibit
13	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah pengawasan peredaran benih dan/atau bibit

## 2. Indikator Sasaran Luas Kawasan Hutan yang Dikelola (Hektar)

Indikator ini didukung oleh Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, dengan kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan. Adapun sub kegiatan yang berada pada program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
I PROGRAM PENDIDIKAN dan PELATIHAN, PENYULUHAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
	Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan
A Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlakasannya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pada wilayah KPH
1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan meningkat kompetensinya.
	jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara
	Jumlah sekolah lapangan yang dilaksanakan
2 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi
3 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi
	Jumlah usulan Perhutanan Sosial
	Jumlah anggota Perhutanan Sosial yang mengikuti forum
	Jumlah fasilitasi kewirausahaan
	Jumlah Alat Ekonomi Produktif yang difasilitasi

### 3. Indikator Sasaran Indeks Tutupan Hutan (Indeks)

Indikator ini didukung oleh 3 (tiga) Program yaitu (1) Program Pengelolaan Hutan dengan kegiatan pendukung yaitu Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi, Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan



Negara, Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m<sup>3</sup>/Tahun, (2) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dengan kegiatan pendukungnya yaitu : Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, (3) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das), dengan kegiatan pendukung yaitu, Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Adapun sub kegiatan yang berada pada program dan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
I	Program Pengelolaan Hutan	Indeks tutupan hutan
A	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pengelolaan rencana tata hutan pada wilayah KPH
1	Sub Kegiatan Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	sub kegiatan : Jumlah dokumen rencana bisnis (desain tapak) yang tersusun
2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	sub kegiatan : Panjang penataan blok/pemeliharaan batas pada wilayah KPH yang terlaksana
3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH yang tersedia dan terpelihara
B	Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Terlaksananya pengelolaan KPH

1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek UPTD KPH yang tersusun
		Jumlah dokumen review rencana pengelolaan yang dilaksanakan
C	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terehabilitasinya lahan diluar kawasan hutan pada wilayah KPH
1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang tersusun
2	Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang terbangun
3	Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah bangunan sipil teknis kehutanan
4	Sub Kegiatan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah unit persemaian
		Jumlah Kebun Bibit Rakyat yang terbangun
		Jumlah Arboretum untuk pelestarian Sumber Daya Genetik
5	Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan RHL
		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5
D	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya perlindungan hutan pada wilayah KPH
1	Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kasus Tindak Pidana Kehutanan yang tertangani
		Jumlah Patroli Pengamanan Hutan
		Jumlah Peta Rawan Kerusakan Hutan
		Jumlah satgas LMPHBN

2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan
3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Patroli, koordinasi, sinkronisasi Pencegahan Dan penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan pada Wilayah Kelola KPH. Jumlah masyarakat peduli api yang terfasilitasi.
E	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Terlaksananya pengawasan pengolahan HHBK pada wilayah kelola KPH
1	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah izin Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu yang terkendali.
2	Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas budidaya tanaman unggulan lokal dan produktif
F	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m <sup>3</sup> /Tahun	Terlaksananya pemantauan pengolahan HHK dengan kapasitas produksi <6000 m <sup>3</sup> /Tahun pada wilayah KPH
1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m <sup>3</sup> /Tahun	jumlah izin Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m <sup>3</sup> /Tahun yang terkendali.
II	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Tutupan Hutan
A	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksananya pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pada wilayah KPH

1	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Konservasi Ekosistem
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Konservasi Ekosistem yang difasilitasi
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Indeks Tutupan Hutan
A	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan DAS di wilayah kelola KPH
1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah kinerja pengelolaan DAS yang terevaluasi
2	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Petak Ukur Permanen yang terbangun dan terre-enumerasi monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan yang tersusun
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Kelompok masyarakat yang diberdayakan
4	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah lembaga pengelolaan DAS

**MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**RENSTRA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026**

VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN  
 MISI : 1) Misi 3 : Meningkatkan Nilai Tambah dan Produktifitas Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan  
 2) Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	Data capaian awal tahun (2021)	TARGET KINERJA					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
					TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	Meningkatnya unit usaha berbasis kehutanan	Jumlah Unit Usaha Berbasis Kehutanan (Unit)	Jumlah Unit Usaha Tahun sebelumnya + Jumlah Unit Usaha Tahun sekarang	0 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
Meningkatnya Pendapatan Petani Hutan	Meningkatnya Luas Kawasan Hutan yg dikelola Kelompok Masyarakat	Luas kawasan hutan yang dikelola (Hektar)	(Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal) / (jumlah total usulan KTH yang terintegrasi) x 100%	50 Ha	50,000 Ha	50,000 Ha	50,000 Ha	50,000 Ha	50,000 Ha	50,000 Ha
Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Meningkatkan kualitas hutan dan lahan	Indeks Tutupan Hutan	Menggunakan Aplikasi Arc.GIS : Peta penutupan lahan tahun N-1 dan citra Sentinel 2A tahun N kemudian dianalisis luas per kelas penutupan lahan (21 kelas penutupan lahan) kemudian untuk lokasi berhutan diklasifikasikan kembali menjadi 7 kelas penutupan lahan per Kabupaten yaitu Hutan lahan kering primer, Hutan lahan kering sekunder, Hutan mangrove primer, Hutan mangrove sekunder, Hutan rawa primer, Hutan rawa sekunder, Hutan tanaman	64,20 Indeks	61,41 Indeks	60,98 Indeks	60,55 Indeks	60,12 Indeks	59,69 Indeks	59,26 Indeks

Padang, Desember 2021  
 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

**YOZARWADI U.P. S.Hut.M.Si**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19690406 199701 1 002

